

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia yang dikenal dengan Negara Kepulauan dengan luas daratan yang dimiliki melebihi luas lautannya, kini sedang berusaha untuk dapat bersaing dengan negara – negara maju di berbagai belahan benua lainnya. Namun banyak permasalahan yang terjadi dibangsa ini yang mengakibatkan tidak meratanya pembangunan didaerah-daerah tertentu, . Untuk itu sektor yang kini menjadi pusat perhatian dari pemerintah pusat adalah pembangunan infrastruktur yakni perbaikan sarana transportasi dan pembangunan beberapa bangunan lainnya yang sangat perlu untuk dilaksanakan.

Pada tahun 1998, di Amerika Serikat, ASCE telah mempublikasikan tiga laporan struktur dan sejumlah laporan status yang dimutakhirkan datanya sehingga dapat digunakan untuk memberi solusi dan peningkatan infrastruktur pada masa mendatang. Laporan infrastruktur tersebut telah disitasi dalam berbagai tulisan artikel dan laporan studi akademik, pejabat pemerintah pun menggunakan laporan tersebut sebagai pedoman untuk pengambilan kebijakan dalam pembangunan infrastruktur di negara bagiannya. Untuk mengembangkan infrastruktur, ASCE telah membentuk panel pakar yang terdiri dari berbagai bidang konsentrasi infrastruktur yang memiliki reputasi nasional untuk menenukan lingkup dan penilaian, juga anggaran yang

dibutuhkan. Hal yang sama sudah terjadi di Australia tahun 2001 yang mulai menggunakan model Amerika Serikat untuk membuat penilaian infrastruktur di Australia.

Konsep awal untuk pembuatan laporan infrastruktur dimulai tahun 1988. Saat itu dibentuklah komisi nasional untuk pengembangan pekerjaan umum. Laporan infrastruktur *Fragile Foundation: A Report on America's Publics Works*, berisi tentang rekomendasi bagaimana negara meningkatkan kemampuan infrastrukturnya dalam melayani kegiatan masyarakat. Komisi tersebut pun melakukan studi yang tentang bagaimana meningkatkan infrastruktur. Untuk memandu studi tersebut, komisi tersebut juga telah menyusun *baseline* untuk mengevaluasi infrastruktur. Laporan tersebut terdiri dari delapan kategori infrastruktur dan memuat tingkatan penilaian berdasarkan kinerja dan kapasitas infrastruktur yang ada. Di tahun 1998, dilaporkan nilai infrastruktur rata – rata masih berada di tingkatan C. Tingkatan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian infrastruktur yang ada masih pada tingkat cukup. Penilaian tersebut ditentukan berdasarkan masalah yang terjadi pada infrastruktur yang ada dan permasalahan saat itu adalah terjadi kemacetan lalu lintas dan kemampuan dalam pemeliharaan untuk menghadapi umur infrastruktur yang semakin tua masih belum baik. Oleh karena itu para anggota komisi mengusulkan investasi fisik yang dapat menunjang biaya operasi dan kebutuhan pada masa mendatang.

Studi ASCE pada dekade berikutnya menunjukkan bahwa nilai infrastruktur di Amerika semakin menurun dan rata – rata tingkat nilainya berkurang. Hal ini disebabkan karena menurunnya nilai infrastruktur sekolah, penyedia air bersih, jalan, dan dam. Menurunnya nilai infrastruktur tersebut mengejutkan anggota komisi dan pihak lain seperti praktisi dan pengamat dari anggota masyarakat yang peduli pada infrastruktur. Pada tahun 2001, infrastruktur di Amerika mengalami peningkatan ke nilai D+, namun pada tahun 2005 tingkatannya kembali turun ke nilai D. Hasil laporan tersebut diketahui terjadi hal yang sama dengan laporan awal di tahun 1988 dimana masalah yang terjadi adalah masalah pemeliharaan dan ketidakmampuan penyediaan dana dalam proses pengembangan infrastruktur. ASCE pun mengusulkan biaya sebesar triliunan dollar untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur beserta pemeliharannya agar infrastruktur tersebut dapat berfungsi dan berjalan dengan baik.

Indonesia International Infrastructure and Exhibition 2012 (IIICE 2012), memberikan pandangan yang kritikal untuk industri infrakstruktur seperti Energi Pembangkit Daya dan Distribusi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Transportasi Jalan, Udara, Laut, Air serta Manajemen Air dan Limbah. Penilaian kelayakan infrastruktur merupakan suatu program ASCE untuk memberi data dan mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dinegaranya.

Menurut Catanese, Anthony J., dan James C.S (1979:120) dalam bukunya Perencanaan Kota, bahwa keberadaan infrastruktur ini mempunyai dampak yang sangat besar bagi mutu kehidupan masyarakat, pola pertumbuhan dan prospek perkembangan ekonominya. Namun sejauh ini tidak disadari oleh masyarakat. Terlihat banyak infrastruktur dan sarana lingkungan yang dibangun oleh pemerintah kurang mendapat perhatian dari masyarakat dalam hal pemeliharaannya.

Infrastruktur merupakan fasilitas utama dan sangatlah penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan juga penting. Infrastruktur juga memiliki posisi yang penting bagi keberlangsungan kegiatan penduduk suatu wilayah. Kegiatan penduduk dapat ditampung dalam ruang – ruang sarana sosial dan ekonomi dan tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung oleh pelayanan infrastruktur yang memadai. Fasilitas transportasi misalnya, memungkinkan orang, barang dan jasa diangkut dari satu tempat ke tempat lainnya, perannya sangatlah penting baik dalam proses produksi maupun distribusi komoditi ekonomi. Oleh sebab itu perlunya dukungan infrastruktur yang lebih memadai guna menjamin terpeliharanya pertumbuhan ekonomi dengan baik dan mendorong peningkatan intensitas dan kualitas suatu kegiatan yang berakibat pada peningkatan kesejahteraan penduduknya.

Di Indonesia pada masa pemerintah SBY, sudah di bentuk Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang bertujuan untuk pengembangan daerah – daerah tertinggal di Indonesia. Namun banyak

masalah yang terjadi, disebabkan karena prakiraan infrastruktur tidak diketahui secara pasti bagaimana kebutuhan dan pembiayaan infrastruktur di setiap daerah.

Dalam merumuskan perencanaan, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman yang menjadi prasyarat mutlak untuk dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman sesuai kebutuhan masyarakat baik yang mampu disediakan maupun tidak oleh pemerintah. Faktor – faktor tersebut adalah:

1. Pendanaan

Dana tersebut mutlak tersedia sehingga keberadaannya menjadi prioritas utama. Dengan keterbatasan dan inilah maka muncul urutan prioritas dari apa saja yang akan dibangun, sehingga perencanaan yang matang menjadi acuan untuk menghindari kegagalan pelaksanaan pembangunan.

2. Kelembagaan

Keberadaan lembaga pengelola yang menangani masalah perencanaan infrastruktur harus ditunjang oleh kemampuan manajemen pengelolaan. Mulai dari siapa yang merencanakan, melaksanakan, sampai pada yang memelihara hasilnya nanti.

3. Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakatnya juga dapat menentukan perencanaan infrastruktur permukiman untuk wilayahnya. Masyarakat berpenghasilan tinggi akan

membutuhkan infrastruktur yang berbeda dengan masyarakat berpenghasilan rendah, baik dalam kualitas maupun jenisnya.

4. Kemampuan Teknis

Kemampuan teknis yang tinggi dari perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman, tidak saja akan menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik, namun dapat pula menekan biaya pembangunan. Kemampuan teknis ini diperlukan dalam suatu perencanaan pembangunan infrastruktur mengingat dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur selalu tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan.

5. Kondisi Fisik Lingkungan

Fisik lingkungan akan mempengaruhi sistem perencanaan, topografi yang datar akan lebih mudah direncanakan daripada yang terlalu curam. Selain topografi, kondisi fisik lingkungan yang mempengaruhi perencanaan infrastruktur permukiman: hidrologi, curah hujan, geologi, tata lingkungan dan struktur tanah.

6. Bencana Alam

Faktor bencana alam sangat diperlukan sebagai pertimbangan dalam merancang dan membangun infrastruktur. Untuk mengurangi kerusakan akibat bencana maka harus memperhatikan konfigurasi (bentuk, ukuran, ketinggian dan orientasinya), intensitas dan frekuensi ancaman bencana di suatu wilayah, standar – standar rancangan struktural dan non struktural, pilihan bahan/material inti dan pendukung serta kualitas konstruksinya.

7. Peran serta Masyarakat

Pengembangan infrastruktur suatu kota/wilayah tidak dapat dilepaskan dari keikutsertaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan, walaupun penentu kebijakan masih merupakan kewenangan pemerintah. Partisipasi masyarakat diartikan keikutsertaan, keterlibatan dan kesamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan program dan evaluasi. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung dapat berupa sumbangan pemikiran, pendanaan dan material yang diperlukan.

Tersedianya infrastruktur yang memadai dapat menjamin terpeliharanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Hal ini pada gilirannya diharapkan akan dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru. Dari sisi pengembangan wilayah, tersedianya infrastruktur diharapkan dapat mempermudah upaya – upaya pemerataan pembangunan khususnya di wilayah berkembang dan terpencil. Dari aspek sosial, penyediaan infrastruktur memberikan peluang bagi pengurangan kemiskinan melalui penyediaan kesempatan kerja pada tahap pembangunan maupun dengan meningkatkan akses dan setelah infrastruktur tersebut dioperasikan, masyarakat miskin mampu mendapatkan kualitas layanan kebutuhan dasar yang lebih baik sekaligus membuka akses pada potensi kegiatan ekonomi yang

lebih produktif. Kondisi Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan, telah menyebabkan kegiatan produksi dan perdagangan di daerah ini relatif lebih mahal. Pada daerah – daerah yang relatif terpencil dan terisolasi, kegiatan produksi dan perdagangan relatif terbatas, karena tingginya biaya produksi dan perdagangan. Kondisi ini lebih diperparah oleh terbatasnya sarana dan prasarana pendukung. Kondisi terbatasnya infrastruktur di Maluku juga dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat, yang membatasi pengeluaran untuk bidang infrastruktur di Indonesia pada periode sebelumnya. Laporan ini diharapkan dapat membantu pemerintah Provinsi Maluku dalam memantau sejauh mana kemampuan dan potensi infrastrukturnya dalam menghadapi perkembangan provinsi dan daerahnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan – penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mengetahui kelayakan infrastruktur yang dapat mendukung kegiatan sosial di Provinsi Maluku.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk menilai sampai sejauh mana kelayakan infrastruktur menurut para insinyur teknik sipil, yang dapat mendukung kegiatan sosial dan ekonomi di Provinsi Maluku.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sarana yang dapat digunakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mengontrol dan mengembangkan infrastrukturnya.
2. Sebagai sarana yang dapat digunakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mengetahui kelayakan infrastruktur yang ada di Provinsi Maluku.
3. Sebagai tolak ukur yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk menyusun APBD.

1.5 Ruang Lingkup

Infrastruktur yang akan dimasukkan dalam penyusunan laporan ini meliputi : pelabuhan udara, pelabuhan laut, terminal, jembatan dan jalan (jalan provinsi dan kota/kabupaten), dam dan irigasi, air minum, buangan air kotor, buangan sampah, telekomunikasi, energi, obyek fasilitas pariwisata, sekolah/universitas di Provinsi Maluku.

1.6 Keaslian Tugas Akhir

Berdasarkan data tugas akhir di Universitas Atma Jaya Yogyakarta tugas akhir dengan judul Analisis Kelayakan Infrastruktur Di Provinsi Maluku Berdasarkan Penilaian Praktisi dan Akademisi Teknik Sipil belum pernah dilakukan sebelumnya.